

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan fokus *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo, yang diukur menggunakan indikator dari Brinkerhoff (2010). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Inisiatif pemerintah

Dapat diketahui bahwa langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk pemulihan ekonomi melalui UMKM. Maka dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam berinisiatif melalui pencetusan kebijakan/program serta pendampingan yang bertujuan untuk mengoptimalkan UMKM Sidoarjo. Dengan kondisi COVID-19 yang tengah terjadi, *goodwill* Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Prioritas

Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memprioritaskan UMKM karena UMKM dinilai yang paling tahan banting dan paling elastis menghadapi segala permasalahan perekonomian Sidoarjo. Terlebih lagi, sektor perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor perdagangan dan UMKM. Maka dalam hal ini, alokasi biaya untuk keperluan program pemberdayaan UMKM sebagai skala prioritas cukup besar, yakni Rp. 21. 232. 783. 375 berdasarkan APBD Sidoarjo Tahun 2022.

3. Mobilisasi dukungan politik

Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menciptakan ruang peluang untuk dialog dan partisipasi, serta mengkoordinasikan aksi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Upaya mobilisasi dukungan politik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diwakili oleh Wakil Bupati Sidoarjo yang berkonsolidasi dengan Ketua MWCNU Se-Sidoarjo untuk membuat pasar murah dan galeri UMKM Sidoarjo. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan interupsi kepada dinas-dinas terkait, puskesmas, dan seluruh kecamatan Sidoarjo untuk bersama-sama dalam mensukseskan program-program UMKM.

4. Komitmen publik dan alokasi sumber daya

Dapat diketahui bahwa dalam rangka menciptakan komitmen publik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah membangun komunikasi dan pendekatan diri kepada pelaku UMKM. Cara tersebut bertujuan agar masyarakat yakin bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak sekedar pencitraan semata. Serta, pembagian peran sebagai perwujudan alokasi sumber daya sudah dijelaskan pada LKPJ Tahun 2021 dan dibagi berdasarkan tupoksi masing-masing.

5. Penegakan hukum

Dapat diketahui bahwa UMKM Sidoarjo memiliki payung hukum yakni Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Adanya regulasi tersebut juga mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar UMKM

dapat naik level. Maka untuk mencapai itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus bersosialisasi dan memberikan pelayanan mengenai pentingnya legalitas usaha, bahkan dengan metode jemput bola.

6. Kontinuitas usaha

Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyusun usaha dalam jangka pendek yang dapat ditinjau di RKPD tahun 2022. Kemudian untuk jangka menengah dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, dan jangka panjang di RPJPD tahun 2005-2025. Seluruh usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah terorganisir dengan baik yang menunjukkan adanya usaha yang kontinu, serta didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk UMKM.

7. Adaptasi dan belajar

Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semua serba digital. Hal ini menjadikan tantangan untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk berupaya memberikan pemahaman pelaku UMKM Sidoarjo terhadap teknologi yang masih belum merata. Serta, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga belum tepat sasaran terkait bantuan-bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM, sehingga ini menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dari seluruh indikator yang sudah dijabarkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak berhenti pada inisiatif pemerintah saja. Namun, juga terdapat

kontinuitas usaha hingga adaptasi dan belajar. Meskipun belum sempurna karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran, tetapi *goodwill* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dinilai masyarakat lebih serius daripada sebelumnya dapat membuktikan kredibilitas dan kualitas pemerintah secara baik. Dengan demikian, *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo betul-betul berkomitmen untuk mengoptimalkan UMKM Sidoarjo sebagaimana ditinjau melalui indikator *political will* dari Brinkerhoff (2010).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran untuk pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan yang terbaik selama ini, namun seharusnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih memperhatikan kepada siapa bantuan-bantuan UMKM diberikan, sehingga harapannya segala program dan bantuan dapat tepat sasaran.
2. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka hal ini juga dapat menjadi hal yang positif apabila pelaku UMKM dapat beradaptasi dan menerimanya dengan bijak, seperti pemasaran melalui skema media sosial atau *e-commerce*.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempelajari *political will* pemerintah dalam aspek yang lain. Hal ini bertujuan agar dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai pentingnya *political will* dalam suatu kebijakan atau program.